

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkayang

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan peta jalan strategis dan operasional yang dirancang khusus untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkayang. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) secara sistematis dan terukur, guna mencapai nilai tertinggi dalam evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Peta jalan ini mentransformasikan kewajiban PUG dari sekadar kepatuhan administratif menjadi keunggulan strategis yang secara fundamental meningkatkan efektivitas, inklusivitas, dan akuntabilitas layanan penanggulangan bencana bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

Analisis mendalam terhadap formulir penilaian APE dan mandat penanggulangan bencana nasional menunjukkan bahwa BPBD memiliki posisi unik untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai PUG kabupaten. Bencana, secara inheren, memperlihatkan dan memperburuk ketidaksetaraan gender yang ada; oleh karena itu, institusi yang berada di garda terdepan penanggulangan bencana harus menjadi motor penggerak utama dalam implementasi PUG.

Peta jalan ini dibangun di atas tiga pilar strategis yang saling terkait:

- Penguatan Fondasi Kelembagaan:** Membangun prasyarat internal yang kokoh di dalam BPBD melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam analisis gender, pelembagaan sistem data terpilah yang valid sebagai dasar perencanaan, serta optimalisasi peran strategis BPBD dalam Kelompok Kerja (Pokja) PUG tingkat kabupaten.
- Integrasi PUG dalam Siklus Manajemen Bencana:** Mengarusutamakan perspektif gender secara konkret ke dalam seluruh siklus operasional BPBD, mulai dari tahap pra-bencana (perencanaan, pencegahan, dan kesiapsiagaan), tahap tanggap darurat (pelaksanaan respons yang menjaga martabat dan keselamatan), hingga tahap pasca-bencana (pemulihan yang memberdayakan dan berkeadilan).
- Pengembangan Program Inovasi Unggulan:** Meluncurkan program-program inovatif yang memiliki daya ungkit tinggi dan dampak masif, seperti inisiatif "Srikandi Tangguh Bencana Bengkayang" dan menjadikan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sebagai motor penggerak PUG di tingkat akar rumput.

Implementasi peta jalan ini secara konsisten tidak hanya akan memastikan pemenuhan setiap indikator dalam formulir penilaian APE dengan bukti dukung yang kuat dan relevan, tetapi juga akan menghasilkan dampak nyata di lapangan. Hal ini akan mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih efektif, mengurangi kerentanan kelompok-kelompok spesifik seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia, serta membangun ketangguhan komunitas yang lebih adil dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkayang.

Bagian 1: Penguatan Fondasi Kelembagaan PUG di Lingkungan BPBD Bengkayang

Fondasi kelembagaan yang kuat merupakan prasyarat mutlak untuk keberhasilan implementasi PUG yang berkelanjutan. Tanpa adanya kapasitas internal, sistem pendukung, dan koordinasi yang efektif, setiap program yang dijalankan akan bersifat sporadis, tidak terukur, dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Bagian ini menguraikan langkah-langkah strategis untuk membangun fondasi tersebut di lingkungan BPBD Bengkayang, yang secara langsung menjawab indikator-indikator kunci dalam komponen "Pelembagaan PUG" pada formulir penilaian APE.

1.1. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Responsif Gender

Kualitas intervensi penanggulangan bencana sangat bergantung pada kompetensi personel yang menjalankannya. Indikator APE 2.1 secara eksplisit menuntut ketersediaan SDM yang terlatih PUG di setiap Perangkat Daerah (PD), mencakup perencana, pelaksana teknis, pemantau, dan evaluator. Bagi BPBD, kompetensi ini bukan sekadar pemahaman teoretis, melainkan kemampuan praktis untuk menganalisis bagaimana bencana memberikan dampak yang berbeda terhadap perempuan, laki-laki, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia, serta bagaimana merancang respons yang sesuai. Amanat ini sejalan dengan Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2014 yang mewajibkan adanya pelatihan dan sosialisasi PUG di lingkungan BNPB dan BPBD.

Rencana Aksi:

1. **Pemetaan Kompetensi Awal:** Langkah pertama adalah melakukan asesmen internal untuk memetakan tingkat pemahaman PUG di seluruh jajaran staf BPBD, mulai dari staf pelaksana hingga eselon pimpinan. Asesmen ini dapat dilakukan melalui kuesioner sederhana atau diskusi kelompok terfokus untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan kebutuhan pelatihan yang spesifik. Hasil pemetaan ini akan menjadi dasar untuk merancang kurikulum pelatihan yang relevan dan efektif.
2. **Penunjukan dan Penguatan *Focal Point* PUG:** Menunjuk secara resmi satu atau beberapa staf sebagai *Focal Point* PUG internal BPBD melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Pelaksana. Penunjukan ini merupakan bukti konkret untuk memenuhi indikator APE 2.3.

Focal Point ini harus diberikan mandat yang jelas, sumber daya yang memadai, dan alokasi waktu kerja untuk mengikuti pelatihan tingkat lanjut (misalnya, *Training of Trainers* PUG), serta untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, dan melaporkan implementasi PUG di seluruh bidang dalam BPBD.

3. **Penyelenggaraan Pelatihan Berjenjang dan Berkelanjutan:** Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan PUG yang terstruktur dan berjenjang, dengan mengadaptasi modul-modul terbaik dari tingkat nasional (BNPB, KemenPPPA) dan

internasional seperti *Gender in Humanitarian Action* (GiHA), yang kemudian disesuaikan dengan konteks kebencanaan lokal di Bengkulu.

- **Pelatihan Tingkat Dasar:** Diwajibkan bagi seluruh staf dan relawan BPBD. Materi mencakup pengenalan konsep dasar gender, PUG, analisis kerentanan berbasis gender dalam bencana, serta mandat hukum yang mendasari (Inpres No. 9 Tahun 2000, Perka BNPB No. 13 Tahun 2014).
- **Pelatihan Tingkat Menengah:** Ditujukan bagi staf di bidang Perencanaan, Kedaruratan dan Logistik, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Materi berfokus pada keterampilan teknis seperti penggunaan alat analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP), penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), teknik pengumpulan data terpilah di lapangan, dan penyusunan *Term of Reference* (TOR) kegiatan yang responsif gender.
- **Pelatihan Tingkat Lanjutan:** Dikhususkan bagi Kepala Pelaksana, Kepala Bidang, dan *Focal Point* PUG. Materi mencakup kepemimpinan gender (*Gender Leadership*), strategi advokasi kebijakan dan anggaran PUG, serta teknik integrasi PUG ke dalam dokumen strategis seperti Rencana Strategis (Renstra) BPBD dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD).

Pelatihan PUG harus dipandang bukan sebagai beban administratif atau kegiatan seremonial untuk sekadar memenuhi daftar hadir dan laporan. Ini adalah sebuah investasi strategis yang fundamental bagi peningkatan efektivitas operasional BPBD. Staf yang telah terlatih dan memahami PUG akan memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dalam melakukan kaji cepat di lapangan. Mereka akan mampu melihat melampaui data agregat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan spesifik yang seringkali terabaikan, seperti kebutuhan ibu hamil dan menyusui di lokasi pengungsian, risiko keamanan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan saat mengambil air atau ke toilet, atau hilangnya akses penyandang disabilitas terhadap alat bantu mereka. Kemampuan ini memungkinkan BPBD merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Pada akhirnya, investasi pada pengembangan kapasitas SDM ini akan menghasilkan *return on investment* berupa peningkatan kualitas layanan penanggulangan bencana, penurunan risiko dan penderitaan korban secara lebih signifikan, yang kesemuanya akan menghasilkan data dan laporan capaian yang sangat kuat dan meyakinkan untuk penilaian APE.

1.2. Pelembagaan Sistem Data Terpilah Gender, Usia, dan Disabilitas (GTUD)

Data adalah tulang punggung dari perencanaan berbasis bukti. Tanpa data yang akurat dan terperinci, kebijakan dan program yang dirancang berisiko menjadi tidak relevan dan gagal menjawab permasalahan yang sesungguhnya. Indikator APE pada komponen 3 (Data Terpilah) sangat menekankan pentingnya ketersediaan, pengelolaan, dan publikasi data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Mandat ini diperkuat secara spesifik untuk sektor kebencanaan melalui Perka BNPB No. 7 Tahun 2012 yang mengamanatkan pemilahan data korban menurut jenis kelamin. Ketersediaan data terpilah ini merupakan prasyarat mutlak untuk dapat melakukan analisis gender yang valid, yang menjadi dasar dari seluruh siklus perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagaimana dituntut dalam penilaian APE.

Rencana Aksi:

1. **Revisi Menyeluruh Formulir Pendataan Bencana:** Melakukan revisi segera terhadap semua instrumen dan formulir pendataan yang digunakan oleh BPBD di seluruh siklus penanggulangan bencana. Ini mencakup formulir kaji risiko, formulir pendaftaran pengungsi, formulir kaji cepat (MIRA), dan formulir kaji kebutuhan pasca-bencana (JITUPASNA). Revisi ini harus memastikan adanya kolom-kolom wajib untuk data terpilah minimal: jenis kelamin (Laki-laki/Perempuan), kelompok usia (sesuai standar KemenPPPA/BNPB, misalnya 0-5, 6-17, 18-59, >60), dan status disabilitas (jenis disabilitas). Referensi format dapat mengacu pada lampiran Perka BNPB No. 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan panduan data inklusif lainnya.
2. **Penyusunan Prosedur Tetap (Protap) Pengelolaan Data Terpilah:** Mengembangkan sebuah Prosedur Tetap yang mengatur secara jelas dan rinci seluruh alur pengelolaan data terpilah. Protap ini harus mencakup: (a) siapa yang bertanggung jawab mengumpulkan data di lapangan, (b) bagaimana data diinput ke dalam sistem, (c) metode analisis sederhana (misalnya, pembuatan tabel persentase), (d) format pelaporan, dan (e) mekanisme validasi data. Protap ini harus disahkan oleh Kepala Pelaksana dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanggap Darurat Bencana.
3. **Integrasi Data dengan Sistem Informasi Kabupaten:** Melakukan koordinasi proaktif dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosPPPA) Kabupaten Bengkayang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data terpilah sektoral kebencanaan yang dihasilkan oleh BPBD dapat diintegrasikan ke dalam sistem data tunggal kabupaten (jika ada) atau setidaknya dapat saling dipertukarkan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih komprehensif.

Pelembagaan data terpilah melampaui sekadar pemenuhan kewajiban administratif untuk APE; ia adalah sebuah langkah transformatif yang mengubah posisi BPBD menjadi lembaga yang strategis. Data terpilah adalah alat advokasi anggaran dan kemitraan yang paling kuat. Ketika BPBD mampu menyajikan data kuantitatif yang solid di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau DPRD—misalnya, "Berdasarkan data kaji cepat, terdapat 350 ibu menyusui, 75 lansia dengan keterbatasan mobilitas, dan 120 remaja putri di lima lokasi pengungsian"—maka argumen untuk pengadaan *Dignity Kits* yang sesuai standar, pembangunan ruang laktasi di hunian sementara, atau penyediaan layanan kesehatan reproduksi darurat menjadi sangat konkret, berbasis kebutuhan riil, dan sulit untuk diabaikan. Data ini juga menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun proposal kemitraan dengan lembaga-lembaga PBB seperti UNFPA dan UN Women, atau dengan organisasi non-pemerintah internasional yang memiliki mandat spesifik pada perlindungan kelompok rentan. Kemitraan semacam ini berpotensi mendatangkan sumber daya teknis dan finansial tambahan bagi Kabupaten Bengkayang. Dengan demikian, sistem data terpilah yang solid mengubah BPBD dari sekadar pelaksana respons menjadi advokat berbasis bukti yang memperjuangkan hak dan martabat kelompok paling rentan dalam situasi krisis.

1.3. Optimalisasi Peran BPBD dalam Kelompok Kerja (Pokja) PUG Kabupaten

Efektivitas PUG di tingkat daerah sangat bergantung pada kekuatan mekanisme koordinasi antar-PD. Penilaian APE memberikan bobot yang signifikan pada keberadaan, komposisi keanggotaan, dan fungsionalitas Kelompok Kerja (Pokja) PUG tingkat kabupaten, termasuk kemampuannya dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG. Sebagai anggota Pokja PUG, BPBD memiliki peran dan tanggung jawab yang krusial untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan spesifik dalam konteks kebencanaan terintegrasi secara penuh ke dalam perencanaan PUG kabupaten.

Rencana Aksi:

1. **Memastikan Partisipasi Aktif dan Berkualitas:** Menugaskan perwakilan BPBD yang memiliki kapasitas dan otoritas—idealnya Kepala Pelaksana atau setidaknya *Focal Point* PUG yang telah terlatih—untuk secara konsisten dan aktif menghadiri setiap pertemuan Pokja PUG. Kehadiran ini bukan hanya bersifat seremonial, tetapi harus diiringi dengan persiapan materi yang matang untuk memberikan kontribusi substantif.
2. **Menjadi Sumber Data dan Analisis Sektoral:** Memanfaatkan data terpilah GTUD yang telah dikumpulkan (sepaimana diuraikan pada poin 1.2) sebagai bahan utama untuk dianalisis dan disajikan dalam forum Pokja PUG. BPBD harus proaktif menyuarakan isu-isu gender spesifik yang muncul dalam konteks bencana di Bengkayang. Sebagai contoh, BPBD dapat menyampaikan analisis: "Berdasarkan data pemulihan pasca-banjir di Desa X, kami menemukan bahwa 60% usaha mikro yang terdampak adalah milik perempuan kepala keluarga. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar program pemulihan ekonomi dalam RAD PUG memberikan alokasi prioritas dan skema bantuan yang sesuai untuk kelompok ini."
3. **Melakukan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran:** Secara aktif menyelaraskan dokumen perencanaan internal BPBD (Renstra dan Renja) dengan dokumen RAD PUG kabupaten. Ini berarti, program dan kegiatan responsif gender yang direncanakan oleh BPBD harus secara eksplisit dirancang untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RAD PUG. Sinkronisasi ini akan menjadi bukti dukung yang sangat kuat bagi penilai APE, karena menunjukkan adanya koherensi, sinergi, dan kolaborasi yang efektif antar-PD dalam mencapai tujuan PUG bersama.

Bagian 2: Integrasi PUG dalam Siklus Manajemen Penanggulangan Bencana

Mengintegrasikan PUG ke dalam operasional sehari-hari adalah ujian sesungguhnya dari komitmen sebuah lembaga. Bagi BPBD, ini berarti menerjemahkan konsep PUG dari dokumen kebijakan menjadi tindakan nyata di setiap tahapan penanggulangan bencana. Bagian ini secara sistematis membedah bagaimana PUG dapat diimplementasikan dalam siklus manajemen bencana, yang secara langsung memetakan "7 Proses Pembangunan" (Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, dan Pelaporan) yang menjadi inti penilaian APE ke dalam konteks operasional BPBD: Pra-Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca-Bencana.

2.1. Tahap Pra-Bencana: Perencanaan, Pencegahan, dan Kesiapsiagaan Responsif Gender

Tahap pra-bencana adalah fase paling strategis untuk mengurangi dampak bencana dan membangun ketangguhan yang berkeadilan. Intervensi pada tahap ini secara langsung berkorelasi dengan komponen Perencanaan dan Penganggaran dalam penilaian APE. Perka BNPB No. 13 Tahun 2014 secara tegas mengamanatkan penggunaan analisis gender dalam penyusunan kebijakan, pelibatan aktif dan setara antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan mitigasi, serta peningkatan kapasitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bagi semua kelompok.

Rencana Aksi:

1. **Melaksanakan Analisis Gender Menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP):** Untuk memenuhi tuntutan APE (Bagian II.a, Poin 2.1.c), BPBD harus melakukan analisis gender yang sistematis untuk setidaknya satu program prioritas, misalnya "Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana". Penggunaan alat analisis GAP sangat direkomendasikan karena strukturnya yang logis dan komprehensif. BPBD dapat mengadopsi format GAP yang telah digunakan oleh kementerian/lembaga lain, termasuk BPBD di daerah lain. Dokumen hasil analisis GAP ini akan menjadi bukti dukung utama yang menunjukkan proses perencanaan yang berbasis bukti.
2. **Mengintegrasikan Hasil GAP ke dalam Dokumen Perencanaan:** Hasil analisis GAP—yang mencakup identifikasi isu gender, akar penyebab kesenjangan, reformulasi tujuan program, dan rencana aksi spesifik—harus secara eksplisit dan terdokumentasi diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan formal BPBD, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Langkah ini akan memberikan bukti yang kuat untuk penilaian APE pada poin 2.2 (integrasi gender dalam RPJMD/Renstra) dan 2.5 (integrasi gender dalam Renja PD).
3. **Mengalokasikan Anggaran Responsif Gender (ARG):** Berdasarkan rencana aksi yang dihasilkan dari GAP, BPBD harus mengidentifikasi, menandai (*tagging*), dan menghitung alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG). Ini adalah proses menerjemahkan rencana menjadi komitmen finansial yang nyata dan merupakan salah satu indikator paling krusial dalam penilaian APE (Bagian II.b, Poin 2.1). Contoh konkretnya adalah: jika GAP mengidentifikasi rendahnya partisipasi perempuan dalam sosialisasi, maka rencana aksinya adalah "menyelenggarakan sosialisasi di waktu dan lokasi yang aksesibel bagi perempuan (misalnya, saat pertemuan PKK)". Anggaran untuk kegiatan ini, termasuk biaya fasilitator, materi, dan konsumsi, dapat dikategorikan sebagai ARG.
4. **Mengembangkan Sistem Peringatan Dini (SPD) yang Inklusif:** Saat merancang atau melakukan evaluasi terhadap sistem peringatan dini yang ada, BPBD harus memastikan bahwa sistem tersebut inklusif. Ini berarti pesan peringatan harus sederhana dan mudah dipahami oleh semua tingkat pendidikan. Saluran diseminasinya harus beragam dan mampu menjangkau kelompok yang paling terisolasi, termasuk perempuan di ranah domestik, lansia, dan penyandang disabilitas. Ini bisa melibatkan penggunaan kombinasi teknologi (SMS *blast*, WhatsApp) dan media tradisional yang terpercaya (kentongan, pengeras suara di

rumah ibadah, pengumuman melalui kader PKK atau Posyandu). Yang terpenting, peringatan harus terhubung dengan prosedur evakuasi yang jelas dan inklusif, yang memperhitungkan bantuan bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Untuk mempermudah implementasi, berikut adalah contoh kerangka kerja GAP yang dapat diadaptasi oleh BPBD Bengkayang.

Tabel 1: Contoh Praktis Pengisian *Gender Analysis Pathway (GAP)* untuk Program Kesiapsiagaan Bencana BPBD Bengkayang

Langkah	Komponen Analisis	Contoh Pengisian untuk Sub-Kegiatan: Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di Desa
Langkah 1	Kebijakan/Program/Kegiatan	Sub-Kegiatan: Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Desa Rawan Bencana. Tujuan Awal: Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara menghadapi bencana banjir.
Langkah 2	Data Pembuka Wawasan	Data absensi sosialisasi tahun lalu menunjukkan 85% peserta adalah laki-laki. Data desa menunjukkan jumlah penduduk L/P hampir seimbang. Wawancara dengan beberapa ibu rumah tangga mengungkapkan mereka tidak tahu ada sosialisasi.
Langkah 3	Isu Gender & Faktor Kesenjangan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Akses: Perempuan memiliki akses yang rendah terhadap informasi dan undangan sosialisasi. Partisipasi: Partisipasi perempuan dalam forum pengambilan keputusan terkait kesiapsiagaan sangat rendah. Kontrol: Perempuan tidak memiliki kontrol atas keputusan kapan dan di mana sosialisasi diadakan. Manfaat: Manfaat pengetahuan kesiapsiagaan tidak terdistribusi secara merata.
Langkah 4	Sebab Kesenjangan Internal	Kebijakan: Undangan sosialisasi hanya dikirimkan kepada Kepala Desa dan Ketua RT, yang mayoritas adalah laki-laki. SDM: Fasilitator tidak memiliki perspektif gender untuk secara aktif mendorong partisipasi perempuan. Sumber Daya: Tidak ada alokasi khusus untuk menjangkau kelompok perempuan.
Langkah 5	Sebab Kesenjangan Eksternal	Norma Sosial: Anggapan bahwa urusan kebencanaan adalah "urusan laki-laki". Beban Ganda: Jadwal sosialisasi (jam kerja) seringkali bentrok dengan waktu perempuan mengurus rumah tangga dan anak.
Langkah 6	Reformulasi Tujuan	Tujuan Baru: Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dalam kesiapsiagaan bencana banjir, dengan target partisipasi perempuan minimal 40%.

Langkah 7	Rencana Aksi	1. Menyebarkan undangan melalui jalur informal yang efektif menjangkau perempuan (kader PKK, Posyandu, grup arisan). 2. Menjadwalkan sesi sosialisasi tambahan di sore hari atau akhir pekan. 3. Menggunakan fasilitator perempuan sebagai pendamping. 4. Materi sosialisasi mencakup peran spesifik perempuan dalam penyelamatan anak dan lansia.
Langkah 8	Data Dasar (Baseline)	Persentase partisipasi perempuan dalam sosialisasi tahun sebelumnya: 15%. Tingkat pengetahuan awal perempuan tentang jalur evakuasi: 20% (berdasarkan pre-test).
Langkah 9	Indikator Gender	1. Persentase perempuan yang hadir dalam sosialisasi. 2. Persentase perempuan yang dapat menyebutkan jalur evakuasi aman (berdasarkan post-test). 3. Jumlah usulan dari perempuan yang diadopsi dalam Rencana Aksi Komunitas.

2.2. Tahap Tanggap Darurat: Pelaksanaan Respons yang Menjaga Martabat dan Keselamatan

Tahap tanggap darurat adalah fase paling kritis di mana kerentanan berada pada puncaknya. Situasi darurat, terutama di pengungsian yang padat dan minim privasi, secara signifikan meningkatkan risiko Kekerasan Berbasis Gender (KBG), eksploitasi, dan pelecehan. Oleh karena itu, fase "Pelaksanaan" dalam penilaian APE menuntut adanya intervensi yang tidak hanya cepat, tetapi juga aman, inklusif, dan menjaga martabat semua penyintas. Perka BNPB No. 13/2014 menuntut pelibatan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam tim kaji cepat serta pemrioritasan kelompok rentan. Lebih lanjut, Permen PPPA No. 8 Tahun 2024 memberikan panduan teknis yang sangat detail mengenai standar minimum perlindungan perempuan dan anak dari KBG dalam situasi bencana.

Rencana Aksi:

1. **Standarisasi dan Penyediaan *Dignity Kit* Inklusif:** Mengembangkan standar isi *Dignity Kit* yang akan didistribusikan oleh BPBD. Standar ini harus mengacu pada praktik terbaik internasional seperti yang direkomendasikan oleh UNFPA dan disesuaikan dengan konteks budaya lokal serta kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok. Ini berarti tidak hanya menyediakan satu jenis kit, tetapi beberapa varian untuk perempuan dewasa, remaja putri, ibu hamil/menyusui, dan lansia. Penyediaan kit ini adalah bukti konkret pelaksanaan yang responsif gender.
2. **Penyusunan SOP Pengelolaan Hunian Sementara (Huntara) yang Aman:** Mengembangkan dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pendirian dan pengelolaan lokasi pengungsian/hunian sementara yang aman dan responsif gender. SOP ini harus mencakup standar minimum sebagai berikut:
 - o **Tata Letak Aman:** Memastikan toilet, tempat mandi, dan tempat mencuci untuk laki-laki dan perempuan terpisah, memiliki penerangan yang memadai di malam hari, dapat dikunci dari dalam, dan lokasinya tidak terisolasi.

- **Mekanisme Keamanan Partisipatif:** Memfasilitasi pembentukan komite keamanan di setiap lokasi pengungsian yang melibatkan perwakilan perempuan untuk melakukan patroli dan menjadi titik aduan.
 - **Fasilitas Khusus:** Kewajiban untuk menyediakan Ruang Laktasi yang privat dan nyaman, serta Ruang Ramah Anak yang aman untuk bermain. Penyediaan fasilitas ini secara langsung menjawab indikator APE 11.1 dan 11.2 dan mandat dalam Permen PPPA.
3. **Memastikan Keterwakilan Perempuan dalam Tim Reaksi Cepat (TRC):**
Menetapkan kebijakan internal bahwa dalam setiap pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC) atau tim kaji cepat, harus terdapat personel perempuan. Kehadiran personel perempuan sangat krusial untuk membangun kepercayaan, berkomunikasi secara efektif dengan penyintas perempuan dan anak, serta mengidentifikasi kebutuhan dan risiko spesifik yang mungkin tidak akan diungkapkan kepada personel laki-laki.
4. **Membangun Mekanisme Rujukan Pencegahan dan Penanganan KBG (PP-KBG):**
Bekerja sama secara erat dengan DinsosPPPA dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk membuat alur rujukan kasus KBG yang sederhana, jelas, dan rahasia. Alur ini harus disosialisasikan secara masif kepada seluruh staf BPBD, relawan, pengelola posko, dan para penyintas di lokasi bencana. Ini adalah implementasi langsung dari APE 5.1 dan Permen PPPA No. 8 Tahun 2024.

Sebagai alat bantu praktis dalam perencanaan logistik, berikut adalah contoh standar isi *Dignity Kit* yang dapat diadopsi.

Tabel 2: Standar Minimum Isi *Dignity Kit* Inklusif BPBD Bengkulu

Kategori Penerima	Isi Kit Standar (Wajib)	Isi Kit Spesifik (Tambahan)	Catatan Penting
Perempuan Dewasa & Remaja Putri	1. Tas/Kantong Serbaguna 2. Sabun Mandi 3. Sikat & Pasta Gigi 4. Sampo 5. Sisir 6. Pakaian Dalam (3 buah) 7. Pembalut Wanita (2 pak) 8. Handuk Kecil 9. Senter Kecil & Peluit 10. Deterjen Bubuk	- Kain panjang/sarung - Jilbab (jika relevan secara budaya) - Deodoran - Pembersih wajah	Peluit dan senter adalah alat perlindungan diri sederhana untuk meningkatkan keamanan saat bergerak di malam hari di area pengungsian.
Ibu Hamil & Menyusui	Semua item dari Kit Perempuan Dewasa	- Popok bayi (1 pak) - Kain bedong (2 buah) - Sabun bayi - Minyak telon - Gurita/kain ikat perut untuk ibu	Distribusi kit ini harus diprioritaskan dan dikoordinasikan dengan bidan desa atau petugas kesehatan di posko.
Lansia (Perempuan & Laki-laki)	1. Tas/Kantong Serbaguna 2. Sabun Mandi 3. Sikat & Pasta	- Popok dewasa (1 pak) - Minyak kayu putih/balsam - Kain	Kebutuhan popok dewasa seringkali terabaikan namun

Gigi 4. Handuk Kecil 5. Senter Kecil & Peluit 6. Deterjen Bubuk	panjang/sarung hangat - Pakaian dalam yang nyaman	sangat krusial untuk menjaga martabat dan kesehatan lansia.
---	---	---

2.3. Tahap Pasca-Bencana: Pemulihan yang Memberdayakan dan Berkeadilan

Tahap pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) adalah kesempatan untuk membangun kembali dengan lebih baik (*build back better*), tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial. Fase ini merupakan momen krusial untuk mengoreksi ketidaksetaraan yang ada sebelum bencana dan memastikan proses pemulihan tidak menciptakan kerentanan baru. Dalam kerangka APE, tahap ini mencakup proses Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan. Perka BNPB No. 13 Tahun 2014 Pasal 25 secara eksplisit menekankan pentingnya partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rencana Aksi:

1. **Melaksanakan Kaji Kebutuhan Pasca-Bencana (JITUPASNA) yang Inklusif:** Proses JITUPASNA harus melampaui sekadar penghitungan kerusakan dan kerugian fisik. BPBD harus menggunakan data terpilah GTUD sebagai titik awal analisis. Selanjutnya, wajib untuk menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion* - FGD) yang terpisah dengan berbagai kelompok: kelompok ibu rumah tangga, kelompok perempuan pedagang/petani, kelompok penyandang disabilitas, dan kelompok lansia. Tujuannya adalah untuk menggali secara mendalam kebutuhan pemulihan mereka yang spesifik dan seringkali tidak terlihat, misalnya kebutuhan modal usaha untuk pedagang perempuan yang kehilangan barang dagangan, desain hunian tetap yang aksesibel bagi pengguna kursi roda, atau program pemulihan trauma bagi anak-anak.
2. **Memastikan Keterwakilan Perempuan dalam Mekanisme Pengambilan Keputusan:** BPBD harus secara aktif mengadvokasi dan memfasilitasi agar dalam setiap komite, tim, atau forum perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat desa dan komunitas, terdapat keterwakilan perempuan minimal 30%. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan akan memastikan bahwa program pemulihan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan riil mereka dan tidak didominasi oleh perspektif tunggal.
3. **Mengintegrasikan Indikator Gender dalam Sistem Pemantauan dan Evaluasi (Monev):** Sistem Monev untuk proyek-proyek rehabilitasi dan rekonstruksi harus diperkaya dengan indikator-indikator gender. Ini berarti, BPBD tidak hanya mengukur *output* fisik (misalnya, jumlah rumah yang dibangun, panjang jalan yang diperbaiki), tetapi juga mengukur *outcome* dan dampak gender. Contoh indikator gender: "persentase perempuan yang melaporkan merasa aman dan memiliki privasi di hunian tetap yang baru," "persentase perempuan kepala keluarga yang berhasil memulihkan sumber mata pencahariannya dalam 6 bulan pasca-bencana," atau "jumlah perempuan yang terlibat aktif dalam musyawarah perencanaan pemulihan."
4. **Melaporkan Capaian PUG secara Eksplisit dalam Dokumen Akuntabilitas:** Dalam penyusunan dokumen akuntabilitas resmi seperti Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP/LAKIN), BPBD harus membuat satu sub-bab khusus yang didedikasikan untuk melaporkan capaian implementasi PUG di seluruh siklus penanggulangan bencana. Laporan ini harus didukung oleh data terpilah yang valid, hasil analisis, dan temuan dari evaluasi. Ini merupakan bukti dukung yang paling langsung dan kuat untuk memenuhi indikator APE 1.2 dan 1.3 pada komponen Pelaporan.

Bagian 3: Program Inovasi Unggulan BPBD untuk Percepatan PUG

Untuk meraih predikat tertinggi dalam Anugrah Parahita Ekapraya, sebuah pemerintah daerah tidak cukup hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga harus menunjukkan adanya terobosan atau inovasi. Komponen "Inovasi" dalam penilaian APE secara spesifik menilai program-program yang memiliki daya ungkit, signifikansi, dan dampak masif dalam mempercepat pencapaian kesetaraan gender. BPBD Bengkulu dapat memosisikan diri sebagai pemimpin inovasi dengan meluncurkan program-program unggulan yang secara cerdas mengintegrasikan PUG ke dalam mandat inti penanggulangan bencana.

3.1. Inisiatif "Srikandi Tangguh Bencana Bengkulu"

Paradigma lama seringkali memosisikan perempuan hanya sebagai kelompok korban yang pasif dan rentan dalam situasi bencana. Namun, berbagai studi kasus dan praktik terbaik menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas, pengetahuan lokal, dan jaringan sosial yang luar biasa untuk menjadi agen perubahan dan pemimpin yang efektif dalam upaya pengurangan risiko bencana. Program "Srikandi Tangguh Bencana" dirancang untuk secara sistematis mengubah paradigma tersebut dengan mengidentifikasi, memberdayakan, dan mempromosikan perempuan-perempuan lokal sebagai pelopor ketangguhan di komunitasnya.

Rencana Aksi:

- 1. Identifikasi dan Pemetaan Calon Pelopor:** BPBD berkolaborasi dengan pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, kader Posyandu, dan organisasi perempuan lokal untuk melakukan pemetaan dan identifikasi perempuan-perempuan di setiap desa rawan bencana yang menunjukkan potensi kepemimpinan, aktif di komunitas, dan memiliki kepedulian terhadap isu sosial.
- 2. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengurangan Risiko Bencana (PRB):** Menyelenggarakan program pelatihan intensif yang dirancang khusus bagi para calon "Srikandi" yang telah teridentifikasi. Kurikulum pelatihan harus melampaui sekadar pengetahuan teknis kebencanaan dan mencakup materi-materi pemberdayaan seperti:
 - Teknik fasilitasi untuk kaji risiko partisipatif dari perspektif gender.
 - Keterampilan advokasi untuk menyuarakan kebutuhan kelompok rentan dalam musyawarah desa.

- Manajemen posko pengungsian yang ramah perempuan, anak, dan kelompok rentan.
 - Komunikasi risiko bencana yang efektif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
3. **Fasilitasi Peran dan Aksi di Tingkat Komunitas:** Setelah dilatih, para "Srikandi" ini harus diberikan peran formal dan diakui dalam struktur kebencanaan di tingkat desa, misalnya sebagai anggota inti Forum PRB Desa atau sebagai koordinator unit perempuan dalam Tim Relawan Desa. BPBD kemudian memfasilitasi dan mendukung aksi-aksi nyata yang mereka inisiasi, contohnya:
- Memimpin proses pembuatan peta evakuasi dari perspektif perempuan, yang tidak hanya menunjukkan jalur, tetapi juga mengidentifikasi titik-titik rawan (gelap, sepi) dan rute yang paling aman untuk dilalui anak-anak, ibu hamil, dan lansia.
 - Menginisiasi dan mengelola lumbung pangan komunitas atau dapur umum yang higienis dan memperhatikan gizi spesifik untuk balita dan ibu menyusui.
4. **Publikasi dan Promosi Kisah Sukses:** Mendokumentasikan setiap kegiatan dan kisah sukses dari para "Srikandi Tangguh Bencana" melalui foto, video, dan narasi. Materi ini kemudian dipublikasikan secara luas melalui kanal media sosial Pemerintah Daerah, website resmi BPBD, dan media massa lokal. Profil-profil inspiratif dari para perempuan pelopor ini akan menjadi bukti dukung yang sangat kuat dan bernilai tinggi untuk komponen APE 2.6 (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor).

3.2. Menjadikan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sebagai Motor Penggerak PUG

Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) adalah program prioritas nasional yang telah memiliki kerangka kerja, pedoman, dan seringkali alokasi anggaran melalui Dana Desa. Ini menjadikan DESTANA sebagai "kendaraan" yang paling ideal dan strategis untuk mengintegrasikan dan melembagakan PUG secara sistemik hingga ke tingkat akar rumput. Dengan menanamkan prinsip-prinsip PUG ke dalam kerangka DESTANA, BPBD dapat memastikan keberlanjutan dan perluasan dampak PUG di seluruh wilayah kabupaten, yang secara langsung menjawab tuntutan APE pada komponen 9 (Program pembangunan berbasis kewilayahan).

Rencana Aksi:

1. **Revisi Pedoman Teknis DESTANA Kabupaten Bengkayang:** BPBD, sebagai pembina teknis DESTANA di tingkat kabupaten, perlu merevisi atau membuat suplemen terhadap pedoman pembentukan dan penilaian DESTANA. Revisi ini harus menyisipkan secara eksplisit persyaratan dan indikator-indikator yang responsif gender. Misalnya, dalam indikator "Kajian Risiko", ditambahkan sub-

indikator "Analisis kerentanan yang terpilah berdasarkan gender, usia, dan disabilitas".

2. **Menetapkan Partisipasi Perempuan sebagai Syarat Wajib:** Menjadikan "keterlibatan aktif perempuan (dengan target kuantitatif, misalnya minimal 30%) dalam keanggotaan Forum PRB Desa dan Tim Relawan Desa" sebagai salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh sebuah desa untuk dapat ditetapkan statusnya sebagai DESTANA (baik tingkat Pratama, Madya, maupun Utama). Kebijakan ini akan menciptakan insentif yang kuat bagi pemerintah desa untuk secara proaktif melibatkan perempuan.
3. **Mengintegrasikan Kegiatan PUG dalam Rencana Aksi Komunitas (RAK):** Selama proses fasilitasi pembentukan DESTANA, fasilitator dari BPBD harus memastikan bahwa Rencana Aksi Komunitas (RAK) yang disusun oleh desa memuat kegiatan-kegiatan yang secara spesifik menjawab isu-isu gender yang teridentifikasi di desa tersebut. Contoh kegiatan yang dapat dimasukkan dalam RAK:
 - "Pembuatan dan pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi yang dilengkapi penerangan di titik-titik rawan."
 - "Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan manajemen kesehatan darurat yang diprioritaskan bagi ibu-ibu kader Posyandu."
 - "Program diversifikasi ekonomi bagi kelompok perempuan kepala keluarga sebagai strategi pengurangan kerentanan ekonomi."

Mengintegrasikan PUG ke dalam program DESTANA yang sudah berjalan dan berkelanjutan akan menciptakan sebuah *flywheel effect* atau efek roda gila. PUG tidak lagi dilihat sebagai program tambahan yang terpisah dan bergantung sepenuhnya pada anggaran dan inisiatif BPBD. Sebaliknya, PUG menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda inti pembangunan ketangguhan di tingkat desa. Desa-desa yang berambisi untuk meningkatkan status DESTANA mereka secara otomatis *harus* melaksanakan praktik-praktik yang responsif gender. Keberhasilan implementasi PUG di satu desa percontohan DESTANA akan menjadi model yang dapat direplikasi oleh desa-desa lain, menciptakan sebuah momentum positif yang menyebar secara organik. Ini adalah sebuah bentuk inovasi proses yang memiliki daya ungkit luar biasa, memungkinkan pencapaian dampak yang masif dengan investasi awal yang relatif terfokus dari BPBD, sebuah kriteria yang sangat dihargai dalam penilaian inovasi APE.

Kesimpulan dan Peta Jalan Implementasi

Peta jalan strategis yang diuraikan dalam laporan ini menawarkan serangkaian langkah yang komprehensif, terukur, dan dapat diimplementasikan oleh BPBD Kabupaten Bengkayang untuk menjadi lembaga yang unggul dalam pengarusutamaan gender. Pendekatan yang diusulkan, yang mencakup penguatan fondasi kelembagaan, integrasi PUG dalam seluruh siklus operasional, serta pengembangan inovasi program, akan memposisikan BPBD tidak hanya sebagai entitas yang memenuhi kewajiban administratif untuk penilaian Anugerah Parahita Ekapraya, tetapi sebagai pemimpin sejati dalam praktik penanggulangan bencana yang inklusif, adil, dan efektif.

Implementasi yang konsisten terhadap rekomendasi-rekomendasi ini akan menghasilkan bukti dukung yang solid dan substantif untuk setiap indikator penilaian APE. Lebih penting

lagi, upaya ini akan secara langsung berkontribusi pada peningkatan ketangguhan seluruh masyarakat Bengkayang, dengan memastikan bahwa tidak ada seorang pun, terutama kelompok yang paling rentan, yang tertinggal dalam upaya menghadapi dan pulih dari bencana.

Untuk memandu dan memonitor proses implementasi, disajikan Peta Jalan Implementasi dalam format tabel berikut. Tabel ini berfungsi sebagai *dashboard* bagi pimpinan BPBD untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi penanggung jawab, dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan selaras dengan tujuan akhir untuk meraih prestasi tertinggi dalam APE.

Tabel 3: Peta Jalan Implementasi PUG di BPBD Bengkayang (Tahun 1-2)

Prioritas Strategis	Kegiatan Kunci	Indikator APE Terkait	Penanggung Jawab	Target Waktu	Bukti Dukung yang Harus Disiapkan
1. Penguatan Fondasi Kelembagaan	1.1. Menunjuk <i>Focal Point</i> PUG dan menyelenggarakan Pelatihan PUG Berjenjang.	2.1, 2.3, 2.11	Sekretariat, Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kuartal 1-2, Tahun 1	SK Penunjukan <i>Focal Point</i> , Laporan Kegiatan Pelatihan dengan, daftar hadir, materi, notulensi, foto).
	1.2. Merevisi seluruh formulir pendataan dan menyusun Protap Data Terpilah.	3.1, 3.2, 3.3	Bidang Kedaruratan & Logistik, Bidang Rehab-Rekon	Kuartal 2, Tahun 1	Contoh formulir baru, dokumen Protap yang disahkan, tangkapan layar/contoh data terpilah yang telah diolah.
	1.3. Berperan aktif dalam Pokja PUG dengan menyajikan data kebencanaan.	2.7, 2.8, 2.9	Kepala Pelaksana, <i>Focal Point</i> PUG	Berkelanjutan	Notulensi rapat Pokja PUG yang mencatat kontribusi BPBD, salinan RAD PUG yang memuat masukan dari BPBD.
2. Integrasi PUG dalam Siklus Bencana	2.1. Melakukan analisis GAP untuk program kesiapsiagaan dan mengalokasikan ARG.	II.a (Perencanaan), II.b (Penganggaran)	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan, Perencana	Kuartal 3-4, Tahun 1	Dokumen hasil analisis GAP, Renja & RKA yang memuat ARG, TOR/KAK kegiatan responsif gender.

	2.2. Menyusun SOP Huntara Aman dan Standar <i>Dignity Kit</i> Inklusif.	II.c (Pelaksanaan), 11.1, 11.2	Bidang Kedaruratan & Logistik	Kuartal 1, Tahun 2	Dokumen SOP yang disahkan, dokumen standar isi <i>Dignity Kit</i> , foto-foto implementasi saat simulasi/bencana.
	2.3. Mengintegrasikan indikator gender dalam Monev dan LAKIP BPBD.	II.d, II.e, II.g	Sekretariat, Seluruh Bidang Teknis	Kuartal 4, setiap tahun	Contoh formulir Monev, salinan LAKIP BPBD yang memiliki bab khusus PUG.
3. Program Inovasi Unggulan	3.1. Meluncurkan program "Srikandi Tangguh Bencana" (identifikasi, pelatihan, fasilitasi).	III (Inovasi), 2.6	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kuartal 2-3, Tahun 2	Laporan kegiatan, profil para "Srikandi", dokumentasi (foto/video) aksi mereka di komunitas.
	3.2. Merevisi pedoman DESTANA untuk mengintegrasikan PUG sebagai syarat wajib.	III (Inovasi), 9.1, 9.2	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kuartal 2, Tahun 2	Dokumen pedoman DESTANA yang telah direvisi, SK penetapan DESTANA yang menunjukkan pemenuhan syarat PUG.